



Why Islamic Economics ? The Difference Between The Conventional System And The Islamic Economic System

Muhammad Kambali
STAI Al-Azhar, Menganti, Gresik
kambali236@gmail.com

Jamiatus Dinny Sholikah
STAI Al-Azhar, Menganti, Gresik
jamiatus87@gmail.com

Misella Sandi
STAI Al-Azhar, Menganti, Gresik
sandimisella@gmail.com

Received: Desember 27, 2022 Revised: Maret 04, 2023
Accepted: Maret 06, 2023 Published: Maret 07, 2023

Abstract: The presence of an economic system is a real part of efforts to answer the economic problem of what, how, for whom. Every economic system has different ways and ways of solving these problems. This research aims to answer the main problem, why does it have to be Islamic economics? With the liberal research approach, these problems are discussed starting with data collection based on secondary data in the form of research articles and books related to the main focus of the research. The data were then analyzed using content analysis and comparative descriptive analysis methods. The results of this study indicate that the main reason why an Islamic Economic System is necessary is that Islamic economics is evident from historical records starting from the time of Rasulullah SAW. Until now the Islamic economic system is clearly different in answering the economic problems of what, how, and for whom. The Islamic economic system rests on the principles of values that enable human moral hazard to be minimized by upholding the values of monotheism, justice and balance (ma'ad). While the conventional economic system, capitalism and socialism recorded various negative defects starting from the 1929 crisis, the Subprime Mortgage crisis, the dissolution of the Soviet NEP. The results of this study have implications for strengthening the importance of carrying out economic activities that are based on justice and a balance in life.

Keywords: Islamic Economics, Monotheism, Justice, Subprime Mortgage, Crisis 1929

Abstrak: Hadirnya sistem ekonomi merupakan bagian nyata upaya menjawab permasalahan ekonomi what, how, for whom. Setiap sistem ekonomi memiliki cara dan jalan yang berbeda dalam menyelsaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan utama mengapa harus ekonomi Islam?. Dengan pendekatan *liberary Reseach* permasalahan tersebut dibahas dengan diawali pengumpulan data yang bersumberkan pada data sekunder berupa artikel penelitian dan buku yang berkaitan dengan fokus utama penelitian. Data

selanjutnya dianalisis dengan metode *content analysis* dan analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan utama mengapa harus Sistem Ekonomi Islam adalah ekonomi Islam terbukti dari catatan sejarah mulai dari masa Rasulullah SAW. hingga saat ini sistem ekonomi Islam nyata berbeda dalam menjawab permasalahan ekonomi *what, how, dan for whom*. Sistem ekonomi Islam, bertumpu pada prinsip nilai yang memungkinkan *moral hazard* manusia diminimalisasi dengan tegaknya nilai *Tauhid*, keadilan dan keseimbangan (*ma'ad*). Sementara sistem ekonomi konvensional, kapitalisme dan sosialisme mencatat berbagai cacatan negatif mulai dari krisis 1929, krisis *Subprime Mortgage*, bubaranya NEP Soviet. Hasil penelitian ini berimplikasi pada penguatan pentingnya melakukan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada keadilan dan adanya keseimbangan dalam hidup.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Tauhid, Keadilan, Subprime Mortgage, Krisis 1929*

A. Introduction

Ilmu ekonomi merupakan ilmu mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menentukan atau menjatuhkan pilihan dengan atau tanpa uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai pengunaan-penggunaan alternatif untuk memproduksi berbagai barang serta membaginya untuk dikonsumsi baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang kepada berbagai golongan dan kelompok di dalam masyarakat. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang membahas permasalahan-permasalahan seperti *problem of choice*, kelangkaan sumber produktif, penggunaan uang, serta permasalahan produksi dan distribusi. Oleh karena itu, setiap sistem ekonomi pada hakekatnya bertujuan memecahkan permasalahan tersebut terutama dalam bidang produksi dan distribusi yang dijabarkan dalam 3 terminologi pokok yakni *what, how dan for whom*.¹

Islam sebagai agama sekaligus pandangan hidup (*world view*) berpendapat bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia pada dasarnya telah didesain sedemikian rupa oleh Allah SWT, sehingga segala permasalahan yang muncul pada hakekatnya telah dipersiapkan jawabannya. Dalam konteks ini paradigma konvensional di atas yang memandang masalah ekonomi muncul karena faktor kelangkaan sumber daya produktif yang dihadapkan dengan pola kebutuhan manusia yang tidak terbatas, di pandang sebagian kalangan ekonom Muslim kontemporer tidak tepat. Sebab, dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang benar sebagaimana dalam S. al-Qomar: 49 yang menyatakan Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran²

¹ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 15.

² "Surah Al-Qamar - سُورَةُ الْقَمَرِ | Qur'an Kemenag," 49, accessed March 4, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/54/49>.

Bagi kalangan ini, permasalahan ekonomi muncul karena adanya sistem distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat atas sistem ekonomi yang membolehkan eksplorasi pihak yang kuat terhadap yang lemah. Oleh karena itu kalangan ini menilai bahwa istilah ekonomi tidaklah pernah ada dalam Islam, sebab antara Islam dengan ilmu ekonomi sama sekali tidak ada hubungannya. Pandangan seperti ini sebagaimana diungkapkan oleh kalangan yang mengamini mazhab Baqr Sadr. Sementara itu, M.A Mannan sebagai pelpor mazhab Mainstream menyatakan yang dihadapi oleh ekonomi Islam pada hakekatnya tidaklah berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh ilmu ekonomi konvensional. Oleh karena itu, dalam beberapa hal golongan ini berpandangan bahwa ekonomi Islam merupakan upaya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³ Dalam hal ini, pola pendekatan yang dipakai golongan ini terkenal dengan paradigma ekletisme.⁴

Menurut Sukamto, hadirnya ekonomi Islam ditengah kehidupan manusia khususnya di Indonesia telah turut serta mewarnai dalam pertumbuhan perekonomian dalam negeri.⁵ Lebih lanjut Sukamto juga berpendapat bahwa ekonomi Islam mampu menghindarkan dari perangkap ekonomi seperti *bubble economic* yang telah terjadi di sistem kapitalisme Amerika Serikat. Senada dengan Sukamto, Gampito berpendapat bahwa Ekonomi Islam merupakan satu solusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator semisal bagaimana ekonomi Islam sangat konsen pada tercapainya perubahan pada sektor riil yang bertumpu pada kegiatan ekonomi masyarakat bawah.⁶ Sementara Tarmizi dalam penelitiannya menyatakan bahwa antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Konvensional sejatinya didasarkan pada filosofi yang berbeda. Ekonomi Islam lebih

³ Gampito Gampito, "Menggapai Ekonomi Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 11, no. 2 (August 21, 2018): 141, <https://doi.org/10.31958/juris.v1i2.1121>.

⁴ Sukamto, "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Mainstream Dalam Mendorong Geliat Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang Studi Di Indonesia," *Jurnal Mu'allim* 1, no. 2 (September 5, 2019): 199–216, <https://doi.org/10.35891/muallim.v1i2.1624>.

⁵ Sukamto, 199.

⁶ Gampito, "Menggapai Ekonomi Islam," 141.

bertumpu pada kesejahteraan bersama sementara sistem ekonomi konvensional bertumpu pada kebebasan individu dalam berusaha.⁷

Dalam sistem kapitalisme beberapa catatan krisis yang pernah terjadi seperti Krisis 1929, krisis *Subprime Mortgage*, dan krisis di era pandemic covid 19. Krisis ekonomi 1929 yang dikenal dalam sejarah sebagai *the great depression* telah melahirkan dampak yang begitu luar biasa bagi kehidupan manusia saat itu dalam kurun waktu 10 tahunan. Tak terkecuali bagi Indonesia kala itu Hindia Belanda, juga merasakan dahsyatnya krisis ekonomi ini. Beberapa dampaknya dicatat dalam sejarah semisal hancurnya harga komoditas dan permintaan Internasional, serta terjadinya defisit keuangan negara yang disebabkan oleh peneremian yang menurun.⁸ Beralih dalam kurun waktu 2000 an tepatnya 2008 s/d 2009 sistem kapitalisme juga mengulang sejarah krisis ekonomi. Krisis yang bermula dari sektor properti yang mengalami kredit macet pada akhirnya melahirkan rangkaian krisis sebab diiringi dengan transaksi derivatif dari sektor properti ini. Dalam sejarah krisis ini dinamakan dengan krisis *subprime mortgage*. Tidak jauh berbeda dengan kapitalisme, Sosialisme juga menorehkan catatan krisis serupa, setidaknya dengan ditandai dengan bubarnya Uni Soviet dengan program ekonomi *New Economic policy* (NEP).⁹

Dari paparan di atas, merujuk pada pandangan para ahli dan beberapa hasil penelitian terbaru dari kurun waktu 2018-2022 serta beberapa catatan sejarah sebagaimana diungkap oleh para ekonom dunia, maka penelitian ini bertujuan untuk menegaskan satu pandangan bahwa ekonomi Islam merupakan satu solusi nyata yang mampu menghadirkan jaminan keadilan yang menitikberatkan pada kehidupan yang seimbang dan kebaikan bersama. Oleh sebab itu, dengan fokus masalah mengapa harus ekonomi Islam yang sekaligus menjadi

⁷ Tarmizi Tarmizi, "Comparison Of Islamic Economy And Conventional Economy To People's Income Growth In Reducing Poverty And Unemployment," *Jurnal Ilmiah Teunuleh* 1, no. 2 (December 28, 2020): 260, <https://doi.org/10.51612/teunuleh.v1i2.42>.

⁸ Kompas Cyber Media, "Dampak The Great Depression terhadap Hindia Belanda Halaman all," KOMPAS.com, November 8, 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/11/08/190000779/dampak-the-great-depression-terhadap-hindia-belanda>.

⁹ "New Economic Policy," in *Wikipedia*, February 17, 2023, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Economic_Policy&oldid=1139949830.

bagian dari judul penelitian ini, bertujuan untuk menguraikan satu keunggulan ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi Konvensional.

B. Literature Review

I. Prinsip Ekonomi Islam

Pada dasarnya, prinsip dasar ekonomi Islam terdiri atas tiga hal yaitu prinsip *Tauhid*, *Khilafah* dan *Al-'Adalah* (keadilan). Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi kerangka kerja bagi Ekonomi Islam namun, juga merupakan tujuan dan sumber utama *maqashid* dari syari'ah Islam. Pertama, *Tauhid*. Merupakan fondasi utama dalam Islam. Tauhid merupakan dasar dari seluruh ajaran Islam yang menyatakan pada ke Esaan dan ke Mahaagungan kekuasaan Allah SWT. Dalam ranah ekonomi Islam, Tauhid merupakan pengakuan manusia atas penciptaan alam seisisnya oleh Allah SWT. Sehingga keberadaan alam beserta seisinya bukan terjadi secara kebetulan sebagaimana teori-teori dari sarjana barat yang mengkaji tentang asal-muasal alam semesta ini. Prinsip tauhid, juga mengajarkan pada manusia, bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia termasuk didalamnya harta kekayaan adalah semata-mata berasal dari Allah SWT. yang bersifat nisbi/relatif. Sedangkan yang abadi dan mutlak hanya milik Allah swt saja. Dengan demikian, tauhid merupakan ruh/fondasi dari ekonomi Islam. Kedua, *Khilafah*. Dalam konsepsi ekonomi Islam, manusia merupakan khalifah Allah swt di bumi. Manusia diutus Allah swt ke bumi membawa misi menjadi seorang khalifah dalam arti sebagai wakil Allah SWT. dan pemakmur bumi. Alam seisisnya sebagai hasil ciptaan Tuhan semata-mata hanya untuk manusia guna dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat. Ketiga, *Al-Adl* (keadilan). Keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dikompromikan, artinya keadilan mempunyai urgensi yang teramat besar dalam kahidupan manusia.¹⁰ Manusia bisa hidup dalam kesusahan dan kelaparan, akan tetapi manusia tidak akan mampu bertahan hidup dalam

¹⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi: Suatu Pengantar*, h. 109

ketidakadilan. Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan disini adalah keadilan yang berarti kebebasan yang bersyarat Islami. Kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidakserasihan dalam masyarakat. Jurang pemisah antara kaya dan miskin akan semakin tajam.

2. Karateristik Ekonomi Islam

a. Kepemilikan ganda (*Multiownership*)

Selain mengakui adanya kepemilikan pribadi, ekonomi Islam juga mengakui adanya kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dengan kata lain, kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah kepemilikan yang didasarkan pada maslahat individu dan maslahat umum.¹¹ Sifat dari kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah kepemilikan yang bersifat relatif. Artinya harta kekayaan yang didapat oleh manusia hanyalah sebatas karunia dan pemberian Allah swt saja. Kepemilikan yang mutlak hanyalah milik Allah swt saja. Oleh karena itu, penerimaan terhadap realitas kepemilikan mutlak manusia, adalah sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang dalam hal ini adalah konsep *al-Tauhid*.¹² Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Jaatsiyah ayat 13

b. Kebebasan Individu

Konsep kebebasan yang terdapat dalam ekonomi Islam adalah kebebasan yang dibatasi oleh kaidah-kaidah syar'i. Artinya dalam melakukan aktivitas ekonomi, walaupun manusia dalam pandangan ekonomi Islam diberikan kebebasan untuk berusaha dan mengumpulkan harta, namun kebebasan tersebut terikat dengan kaidah-kaidah pemerolehan dan pengelolaan

¹¹ Mustahafa Kamal, *Wawasan Islam Dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: UI-Press, 1997), 114.

¹² M. Umer Chapra, *Negara Sejahtera Islam Dan Perannya Di Bidang Ekonomi, Dalam Etika Ekonomi Politik:Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 73.

harta yang telah digariskan oleh syara'. Adapun kaidah-kaidah tersebut antara lain :

1) Ketentuan tentang halal dan haram

Artinya usaha yang dilakukan oleh setiap manusia dalam konteks ekonomi tidak boleh bertentangan dengan hukum syar'i, seperti larangan riba, memperoleh harta dengan jalan yang bathil seperti penipuan dan pencurian.¹³

2) Kewajiban membayar zakat

Islam memandang, walaupun harta kekayaan yang kita dapatkan adalah hasil jerih payah kita sendiri. Namun sesungguhnya di balik harta kita terdapat hak-hak orang lain. Oleh sebab itu, selain untuk mensucikan harta dan memberikan hak-hak orang lain, maka Islam mewajibkan untuk berzakat.

3) Larangan penimbunan harta kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan. Tidak seyogyanya seseorang yang telah memperoleh kekayaan karena usahanya sendiri kemudian hanya disimpan dan ditimbun tanpa dibelanjakan kembali. Sebab, dengan menimbun harta maka perputaran roda ekonomi akan berhenti, sehingga lambat laun kesejahteraan masyarakat akan turun. Oleh sebab itu, penimbunan harta adalah bertentangan dengan hukum syara' dan hukum ekonomi Islam.

c. Kebersamaan dalam menanggung kebaikan (*at-Takaful al-Ijtima'i*)

Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Dalam hal ini manusia selain di posisikan sebagai makhluk individu juga diposisikan sebagai makhluk sosial. Karakter masyarakat sangat dipengaruhi oleh karakter individu-individu. Oleh sebab itu, dalam konteks realisasi kebersamaan dalam menanggung kebaikan, hendaknya

¹³ Ibrohim Lubis, *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 164.

antara individu satu dengan lainnya dalam aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kepentingan umum demi kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat Al-Maidah ayat 2.

3. Tujuan Ekonomi Islam

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*Maqasid al-Syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat.¹⁴ Dalam pada itu, permasalahan ekonomi yang merupakan bagian dari permasalahan yang mendapatkan perhatian dalam ajaran Islam, tentu memiliki tujuan yang sama yakni tercapainya *maslahah* di dunia dan akhirat.

Beberapa pemikiran tokoh Islam mengenai tujuan dari ekonomi Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut. Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mabahis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal, yakni :

a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental, sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dalam Negara adalah dengan jalan mendatangkan investasi.¹⁵

¹⁴ Seluruh ahli Hukum Islam sepakat bahwa tujuan dari Islam (*Maqasid al-Syar'i*) adalah tercapainya *maslahah* yang dijabarkan dalam 5 hal pokok yakni menjaga agama (*al-din*), menjaga jiwa (*al-nafs*), menjaga akal (*al-aql*), menjaga keluarga dan keturunan (*al-nafsl*), dan menjaga harta benda (*al-mal*).

¹⁵ Suansar Khatib, "Distribusi Menurut Ekonomi Islam," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 3, no. 2 (December 29, 2019): 250–70, <https://doi.org/10.29300/mzn.v3i2.1036>.

Landasan filosofis dari konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berakar pada asumsi bahwa semua sumber daya alam baik di langit dan di- bumi semuanya ditundukkan untuk melayani manusia. Dalam hal ini, tanggungjawab manusia terkait dengan penguasaan sumber daya alam adalah dengan kerja yang tujuannya adalah membebaskan masyarakat baik individu atau kelompok dari tekanan kebutuhan ekonomi. Individu dalam masyarakat harus terjamin kebutuhan dasarnya dengan layak supaya terus terjadi harmoni dan kestabilan dalam masyarakat¹⁶

Hal itu akan terwujud dengan melalui hasil kerjanya atau dengan dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan jika terjadi ketidak seimbangan antara kemampuan kerja dengan pendapatannya. Tanggungjawab seperti ini pada saat yang sama akan membantu negara dalam mewujudkan kestabilan dan keamanan baik di dalam dan luar negeri dalam arti yang luas meliputi kestabilan ekonomi, politik, dan sosial.¹⁷

Walaupun demikian, dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan alam tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Beberapa ketentuan tersebut antara lain berkaitan dengan :¹⁸

- Mencapai masyarakat yang kuat yang memiliki unsur-unsur kekuatan ekonomi, peradaban, dan militer yang harus dimiliki untuk menjaga stabilitas masyarakat tersebut.
- Masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang makmur yang menjamin meningkatnya produksi dalam arti yang luas yaitu keadilan distributif yang menuntut terwujudnya pemenuhan kebutuhan tiap individu dalam masyarakat.

¹⁶ Husnatul Mahmudah, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Mea (Masyarakat Ekonomi Asean)," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1, no. 1 (May 26, 2018): 43–54.

¹⁷ Ridan Muhtadi and Safarinda Imani, "Al-Magrizi Inflation Theory Of Islamic Monetary Policy Implementation In Indonesia," *International Journal of Islamic Economics* 2, no. 02 (January 19, 2021): 150–60, <https://doi.org/10.32332/ijie.v2i2.2097>.

¹⁸ Dewi Maharani and Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 2 (November 10, 2020): 131–44, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.

- Merealisasikan keseimbangan pada angota-anggota masyarakat adalah sebuah konsekwensi logis dimana pemenuhan kebutuhan materi bagi tiap individu adalah tanggung jawab masyarakat yang merupakan timbal balik tanggung jawab individu tersebut kepada masyarakat.
- Selain itu, ada perasaan bahagia dan puas karena terlaksananya kewajiban agama dan mengaitkan tujuan kehidupan akhirat yang kekal dengan kehidupan dunia.
- Tercapainya perkembangan dan kontinuitasnya, dianggap sebagai kewajiban agama yang wajib direalisasikan oleh individu, masyarakat dan negara. Ia tidak dianggap sebagai sebuah pilihan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

b. Mewujudkan kesejahteraan manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan *material-duniawi*, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan *spiritual-ukhrowi*.

Menurut Umer Chapra, keselarasan kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat yang senantiasa menjadi konsensus ekonomi Islam dapat terealisasi jika 2 hal pokok terjamin keberadaannya dalam kehidupan setiap manusia. 2 hal pokok tersebut antara lain :

- Pelaksanaan nilai-nilai spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu maupun masyarakat.
- Pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup.

Bagi ekonomi Islam, kesejahteraan manusia hanya akan dapat terwujud manakala sendi-sendi kehidupan ditegakkan di atas nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini, konsep keadilan dalam ekonomi Islam bermakna 2 hal yakni :¹⁹

- Bentuk keseimbangan dan porsi yang harus dipertahankan di antara masyarakat dengan mengindahkan hak-hak setiap manusia.
- Bagian yang menjadi hak setiap manusia dengan penuh kesadaran harus diberikan kepadanya. Dalam hal ini, yang di tuntut ekonomi Islam adalah keseimbangan dan porsi yang tepat bukan persamaan.

Oleh karena itu , konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam yang di atas dikatakan sebagai upaya untuk menselaraskan kepentingan dunia dan akhirat merupakan ciri pokok tujuan ekonomi Islam yang sekaligus di sisi lain membedakan konsep kesejahteraan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain seperti kapitalisme yang berorientasi pada materialisme individual dan sosialisme yang berorientasi pada materialisme kolektif.²⁰

c. Mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil

Dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang sudah menjadi ketentuan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan kecakapan yang berbeda-beda. Namun demikian perbedaan tersebut tidaklah dibenarkan menjadi sebuah alat untuk mengeksplorasi kelompok lain. Dalam hal ini kehadiran ekonomi Islam bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktik penimbunan (*ikhtikar*) dan monopoli sumber daya alam di sekolompok

¹⁹ Chapra, *Negara Sejahtera Islam Dan Perannya Di Bidang Ekonomi Dalam Etika Ekonomi Politik:Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, 29.

²⁰ Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (September 26, 2020): 233–49, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>.

masyarakat.²¹ Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dalam hal ini antara lain dengan cara :

I. Menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Keseimbangan ekonomi hanya akan dapat terwujud manakala kekayaan tidak berputar di sekelompok masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan keseimbangan ekonomi, Islam memerintahkan sirkulasi kekayaan haruslah merata tidak boleh hanya berputar di sekelompok kecil masyarakat sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an S. al-Hasyr: 7

2. Larangan Penimbunan Harta

Sistem ekonomi Islam, melarang individu mengumpulkan harta secara berlebihan. Sebab, dengan adanya pengumpulan harta secara berlebihan berakibat pada mandegnya roda perekonomian²². Oleh karena itu, penimbunan merupakan prilaku yang dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an S. at-Taubah: 34 Sedangkan dalam rangka mencegah praktek monopolistik, ekonomi Islam menawarkan langkah prioritas yang perlu dilakukan oleh otoritas yang berwenang yang dalam hal ini adalah pemerintah.²³ Langkah-langkah tersebut meliputi :

1. Zakat sebagai mekanisme pendistribusian harta dari golongan kaya kepada golongan miskin.
2. Negara harus mengamati dan mengatur pemerataan distribusi sumber daya alam.
3. Kekayaan masyarakat harus di kelolah negara dalam rangka optimalisasi hasil yang maksimal.

²¹ Afif Arrosyid, "Islam Dan Moral Ekonomi Dalam Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara," *MASYRIF: JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN* 2, no. I (June 15, 2021), <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.495>.

²² Neni Hardiati, Chaerul Shaleh, and Fauzan Ali Rasyid, "Epistemologi Politik Ekonomi Islam: Kajian Dalam Perekonomian Negara," *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 6, no. I (February 1, 2022): 380–87, <https://doi.org/10.29040/jie.v6i1.4478>.

²³ Hardiati, Shaleh, and Rasyid.

4. Jasa layanan masyarakat yang menghasilkan keuntungan seperti kereta api, pos dan telegraf, listrik, air dan gas harus dikelola negara dalam rangka untuk menjamin pengelolaan yang efisien dan hasil yang terbaik.
5. Jasa layanan masyarakat yang bersifat *non profitables* seperti jalan, sumur umum, tempat parkir dan yang lain harus di subsidi negara .

Sementara itu, pakar lain juga berpendapat bahwa tujuan ekonomi Islam tidak lain adalah mendorong tercapainya kesejahteraan dan keberhasilan di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Amin Akhtar yang menyatakan tujuan ekonomi Islam hanya dapat dipahami dalam konteks pandangan hidup Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada hakekatnya ekonomi Islam merupakan sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan , kedermawanan, kemanfaatan serta kebijakan dan kemakmuran.

Nilai-nilai tersebut jika dirujuk dalam al-Qur'an, maka akan di dapat beberapa *nash* yang melegitimasi nilai-nilai di atas. Nilai keadilan dapat dijumpai dalam al-Qur'an S. an-Nisa: 135, Nilai kedermawanan dan kemanfaatan dapat dijumpai dalam S. al-Furqan:67, Sedangkan nilai kebijakan dan kemakmuran dapat dilihat dalam S. al-Maidah : 2

Bagi Amin Akhtar konsep keadilan dalam Islam meliputi 3 hal pokok yakni keadilan dalam produksi (*al-intaj*), keadilan dalam konsumsi (*al-istihlaq*) dan keadilan dalam Distribusi (*al-Tauzi'*). Keadilan dalam produksi berorientasi pada pengakuan hak manusia mencari nafkah sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan bakat alam, namun tidak memperkenankan merusak moral dan tatanan sosial.

Keadilan dalam konsumsi berorientasi pada pelarangan segala bentuk pengeluaran yang dapat merusak moral dan masyarakat, seperti minuman keras, zina dan semua bentuk pengeluaran yang dapat merusak jiwa.

Sedangkan keadilan dalam distribusi berorientasi pada keharusan terwujudnya pemerataan kekayaan dan faktor produksi.

Di sisi lain, M. Umer Chapra berpendapat tujuan sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.²⁴ Dengan kata lain, bagi Chapra keberadaan ekonomi Islam merupakan upaya merealisasikan pandangan hidup Islam (*World View*) yang di gali dari *maqasid al-syar'I*. Pandangan hidup tersebut Chapra menjabarkannya dalam 3 prinsip pokok yakni *tauhid*, *khilafah* dan *al-adl* (Keadilan)²⁵

Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan pandangan hidup (*world view*) tersebut, maka bagi Chapra diperlukan sebuah setrategi tersendiri yang merupakan hasil logis dari landasan filosofis yang mendasarinya. Beberapa setrategi yang ditawarkan Chapra dalam hal ini terdiri atas 4 unsur penting yang satu dengan yang lainnya saling mendukung. 4 unsur penting tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Suatu mekanisme filter yang di sepakati oleh masyarakat. Mekanisme filter yang dimaksud adalah dengan meletakkan moralitas sebagai parameter dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam produktif. Dengan kata lain, bagi Chapra mekanisme filter moral di sini mengharuskan setiap komponen masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam hanya diorientasikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat bukan tujuan lainnya.
2. Suatu sistem motivasi yang kuat yang mendorong individu agar berbuat sebaik-baiknya bagi kepentingannya sendiri dan masyarakat.
3. Restrukturisasi seluruh ekonomi, dengan mewujudkan *maqasid*.
4. Peran pemerintah yang berorientasi tujuan yang positif dan kuat.

²⁴ Chapra, *Negara Sejahtera Islam Dan Perannya Di Bidang Ekonomi, Dalam Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, 215–2017.

²⁵ Sukamto, “Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Mainstream Dalam Mendorong Geliat Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang Studi Di Indonesia.”

Tidak jauh berbeda dengan tokoh sebelumnya, Taqiyuddin an-Nabhani dalam maqnum opusnya " *al-Nidzami al-Iqtishadi fi al-Islam* " menyatakan bahwa keberadaan ekonomi Islam memiliki tujuan mewujudkan sistem tata kelolah harta kekayaan yang selaras dengan ajaran Islam, dalam rangka menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.²⁶ Oleh karena itu, permasalahan pokok yang ditangani oleh ekonomi Islam terkait pengaturan harta kekayaan tadi, dijabarkan dalam 3 permasalahan pokok yang terdiri atas kepemilikan (*al-milkijah*), pengelolaan kepemilikan (*tasharuf al-milkijah*) dan mekanisme distribusi harta yang adil di antara manusia.²⁷

C. Research Methods

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Liberary Reseach*). Jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data sekunder dari berbagai literatur artikel *Open Journal System* yang relevan dengan penelitian ini. Data dihimpun dengan menggunakan teknik *bibliography-reserch* yaitu dengan *Reading* : yaitu dengan membaca literatur-literatur yang kaitan dengan tema pembahasan *Organizing* : yaitu dengan mengklasifikasi data yang ada berdasarkan sub-sub pokok pembahasan. *Writing* : yaitu dengan melakukan penulisan atas data yang telah dipetakkan (*organizing*) berdasarkan sub pokok pembahasan. *Analising* : yaitu dengan menganalisa data yang telah dipaparkan (*writing*) berdasarkan sub pokok pembahasan yang dianalisis dengan menggunakan metode dan pendekatan yang telah di tentukan. Adapun metode analisis data yang di pakai adalah dengan teknik *Content-analisis dan analisis deskriptif komparatif*.

²⁶ Taqiyuddin an-Nabhani et al., *Al-Nidzami al-Iqtishadi Fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 1990), 57.

²⁷ an-Nabhani et al., 60.

D. Results and Discussion

Differences between Islamic Economics and Conventional Economy System

Secara umum perbedaan pokok antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional dapat dilihat dalam dua indicator. Indicator pertama adalah kepemilikan dalam harta/modal dan indicator kedua adalah peran negara dalam interaksi ekonomi

I. Kepemilikan dalam Harta/Modal

Parameter yang dapat dilihat secara jelas dalam melihat sisi perbedaan signifikan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Konvensional dalam hal kepemilikan modal/harta dapat dilihat dalam uraian table berikut ini :

Tabel. I Perbedaan Konsep kepemilikan

NO	ASUMSI	ISLAM	SOSIALIS	KAPITALIS
1.	Hakekat kepemilikan	Merupakan naluri atau fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia yang dibawa sejak lahir	Awal mula terlahirnya kelas dalam masyarakat, dimana kaum <i>kapitalis</i> sangat mencengkram kaum buruh (pekerja).	Merupakan bagian integral dari kemerdekaan masing-masing individu.
2.	Sifat kepemilikan	<i>Nisbi</i> (relatif)	Mutlak	Mutlak
3.	Mekanisme pemerolehan dan pendistribusian harta	Harus sesuai dengan ketentuan syara' (memperhatikan kemaslahatan individu dan umum)	Harus dikelola secara kolektif oleh negara (konsekwensi logis dari penghapusan <i>private property</i> dan perwujutan <i>equality</i> secara real)	Setiap individu di beri kebebasan untuk menguasai dan mengelolah faktor-faktor produksi
4.	Kategori	Seimbang	Terbatas sesuai	Tidak terbatas,

	kepemilikan		filosofi yang diungkap Karl Marx “Setiap Orang berdasarkan kemampuannya dan setiap orang berdasarkan kebutuhannya”	artinya barang-barang yang termasuk dalam faktor-faktor produksi bisa di kuasai (dimiliki)
5.	Sebab kepemilikan	Bekerja, waris, adanya harta untuk menyambung nyawa, harta pemberian negara, harta yang diperoleh tanpa kompensasi apapun	Bekerja dan karena kebijakan pemerintah.	Pengelolaan dan penguasaan harta secara maksimal.

Sumber : Data Sekunder diolah 2023

2. Peran Negara Dalam Perekonomian

Kehadiran sistem Ekonomi Islam bila dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional kapitalisme dan sosialisme nampak nyata dalam sikapnya pada interaksi perekonomian dalam negara. Dua filosofi yang berbeda yang mana sistem konvensional kapitalisme saling berhadapan secara tegas dengan sistem Sosialisme nyatanya dalam catatan secara melahirkan berbagai catatan yang buruk dalam kehidupan manusia. Tentu kondisi tersebut tidak terlepas dari bagaimana negara mengambil peran dalam sistem perekonomian. Perbedaan tersebut kami sajikan dalam uraian tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 Perbedaan Peran negara dalam perekonomian

No	Unsur	Ekonomi Islam	KAPITALISME	SOSIALISME
I	Aktifitas ekonomi	Berorientasi pada material dan spiritual	<i>Profit oriented</i>	<i>Profit oriented</i>

2	Karakteristik sistem	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Multitype Ownership</i> - <i>Freedom to act</i> - <i>Social justice</i> 	<ul style="list-style-type: none"> -Kebebasan individu tanpa batas -Kepemilikan pribadi yang dominan -Liberalisasi perdagangan 	Dominasi negara dalam sistem ekonomi
3	Peran swasta	Pada sektor yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak	Sangat dominan	Minimal
4	Keadilan	Berorientasi pada ranah produksi, distribusi, dan konsumsi	Berorientasi pada ranah produksi saja	Berpusat pada otoritas negara
5	Intervensi negara	Bukan hanya pada saat krisis namun juga berorientasi pada dimensi kehidupan diluar ekonomi seperti dampak akulturasi budaya terhadap moral warga	Hanya pada saat ekonomi keluar dari jalurnya (krisis ekonomi)	sangat dominan dengan perencanaan terpusat
6	Proteksi ekonomi	Diperbolehkan dalam rangka melindungi warga	Dilarang, sebab menghambat laju ekonomi	Protektif, terkadang menolak sistem pasar
7	Pola kebijakan ekonomi	Bukan hanya sektor makro, namun juga sektor mikro	Dominan pada sektor makro	Perencanaan terpusat oleh negara

Sumber : Data Sekunder diolah 2023

Why Islamic Economic? Advantages of the Islamic Economic System

Salah satu alasan mendasar mengapa harus sistem ekonomi Islam adalah bahwa sistem ekonomi Islam memberikan satu knsep hidup yang seimbang antara dunia dan

akhirat. Adanya keseimbangan tersebut menjadi penting, sebab dengan keseimbangan menjadikan manusia tidak menghalalkan segala cara dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhannya dalam hidup. Beberapa permasalahan *moral hazard* yang muncul dalam sistem ekonomi tidak lain adalah disebabkan satu faktor utama yakni tidak adanya keseimbangan dalam sistem ekonomi tersebut.

Beberapa permasalahan krisis ekonomi seperti tahun 1929 dimana sistem ekonomi saat itu mengalami krisis ekonomi hebat dengan nama sejarah *the great depressions* merupakan catatan dalam tubuh sistem kapitalisme. Resesi ini dimulai dari Amerika Serikat. Resesi ekonomi ini bermula ketika pada 1925 dan 1927, *The Fed* menurunkan suku bunga untuk mendukung Bank Sentral Inggris (*Bank of England*) dalam menerapkan standar emas.²⁸ Hal tersebut juga berulang pada tahun 2008 s/d 2009 di mana Amerika Serikat sebagai lokomotif Kapitalisme mengalami krisis ekonomi hebat yang dikenal dengan krisis *subprime mortgage*. Krisis tersebut kemudian menumbangkan sejumlah perusahaan seperti Lehman Brothers. Akibat dari krisis tersebut, ekonomi AS terkontraksi 0,34% pada 2008 dan 3,07% pada 2009.²⁹

Hal senada juga dicatat dalam perkembangan sistem sosialisme. Filsafat Marxism yang dijadikan dasar dalam bangunan sistem ini, secara konsep sangat kontras dengan sistem kapitalisme yang penuh dengan keberpihakan pada kaum kapital atau pemilik modal. Sementara sistem sosialisme sebagai sistem yang hadirnya adalah antithesis dari sistem ekonomi kapitalisme. Dengan mengusung misi penghapusan kelas masyarakat sistem ini memandang bahwa hadirnya konflik kelas dalam sejarah manusia adalah hasil nyata dari sistem kelas yang penuh dengan eksploitatif dan melahirkan alienasi. Wujud dari konsepsi sosialisme ini dapat dilihat melalui Uni Soviet dengan model perencanaan terpusat dan penolakan sistem perekonomian pasar. Wujud eksperimen ini pun dicatat dalam sejarah nyatanya tidak bertahan lebih lama dari sistem lawannya yakni kapitalisme. Hingga hari ini,

²⁸ "Mengenal the Great Depression: Krisis Ekonomi Paling Buruk," accessed March 4, 2023, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/01/02/the-great-depression-adalah>.

²⁹ Tim Redaksi, "Badai Besar di Depan Mata! Lebih Ngeri Dari 1998 Atau 2008?," CNBC Indonesia, accessed March 4, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221007091050-4-377928/badai-besar-di-depan-mata-lebih-ngeri-dari-1998-atau-2008>.

jika melihat data sistem sosialisme tidak lagi seperti sistem sosialisme yang dicetuskan dan digagas oleh Karl Marx. Dengan demikian sistem sosialisme juga belum mampu menjadi jawaban atas sistem ekonomi yang ideal yang dibutuhkan manusia.

Gambaran lain nampak berbeda dari apa yang dicatat dalam sistem ekonomi Islam. Dari masa Rasulullah SWA sistem ini dipraktekkan nyata memberikan dampak signifikan dalam menopang kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penetapan harga manakala terjadi sistem pasar yang dibentuk atas dasar kecurangan merupakan hal nyata yang dilakukan oleh Rasullullah SAW. saat itu dengan secara berkala melakukan pemantauan atau inspeksi dipasar. Prilaku ini selanjutnya menjadi cikal bakal lahirnya Lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan persaingan usaha seperti di Indonesia terdapat KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tidak hanya itu, Rasul juga dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat seringkali membagikan harta perbendaharaan negara dalam kas *Baitul maal* yang dibagikan pada seluruh sahabat saat itu dengan sama rata. Kebijakan ini tentunya secara pendekatan ekonomi mikro akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan transaksi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan semacam ini dilanjutkan oleh para sahabat 4 *Khulafaur Rasyidun* dengan berbagai perbedaan yang mengikuti perkembangan zaman saat itu.

Catatan positif lain pada sistem ekonomi Islam adalah sebagaimana yang terjadi di Indinesia pada kurun waktu 1998 yang mana saat itu sedang terjadi krisis ekonomi hebat. Sistem ekonomi Indonesia yang bertumpu pada Sebagian besar prinsip prilaku ekonomi Kapitalisme nyatanya runtuh dengan ditandai banyaknya Lembaga Keuangan yang mendasarkan pada konsep bunga jatuh dan harus tutup. Kondisi berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah yang mendasarkan pada prinsip Islam tetap hidup dan bertahan bahkan tidak mengalami dampak pada situasi ekonomi saat itu. Hal lain juga terulang pada saat situai pandemic covid 19 yang terjadi pada beberapa tahun lalu. Sistem ekonomi yang bertumpu pada kapitalisme dengan basis bunga nyata mengalami penurunan signifikan. Hal berbeda dicatat dalam sistem ekonomi Islam, dilihat dari indikator perkembangan pembiayaan dan jumlah pembiayaan bermasalah (NPL/NPF) justru menunjukkan trend

yang berbeda dengan sistem Kapitalisme yang dipraktekkan Indonesia yang menunjukkan kenaikan jumlah kredit bermasalah atau NPL sejumlah 48,6 %.³⁰

Dari sisi pemetaan pada konsep kepemilikan harta/modal dan peran negara dalam perekonomian sebagaimana dalam gambaran table 1 dan table 2 nampak nyata bahwa sistem ekonomi Islam jika dilihat dalam sudut pandang upayanya dalam memwujudkan kesejahteraan masyarakat sangat nyata sistem ekonomi Islam lebih memberikan jaminan tersebut. Beberapa indikator utama antara lain dalam hal kepemilikan modal/harta sistem ekonomi Islam memperbolehkan bahkan spirit utama dalam sumber hukum Islam yakni Al-qur'an mengharuskan manusia tidak boleh melupakan haknya didunia sebagaimana dala al-Qur'an surat al-Qashas ayat 77.³¹ Dalam hal kepemilikan tentunya adalah sah dan halal manakala didapatkan dari berbagai macam cara yang legal dan tidak merugikan orang lain. Hal tersebut berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme yang nyatanya hanya fokus pada penguasaan materil semata. Kapitalisme bertumpu pada kebebasan individual sedangkan sosialisme pada kolektifitas melalui diktatorian negara yang terkadang menafikan individu. Dari table 2 didapat satu alasan kuat mengapa harus ekonomi Islam adalah bahwa sistem ekonomi Islam dalam hal peran negara sangat memberikan perhatian istimewa. Hal tersebut berbeda dengan sistem kapitalisme yang membatasi peran negara dalam aktifitas ekonomi sedangkan sosialisme yang lebih memberikan otoritas penuh pada negara dalam pengelolaan perekonomian.

E. Conclusion

Hadirnya sistem ekonomi merupakan bagian nyata dalam menjawab permasalahan ekonomi *what, how, for whom*. Setiap sistem ekonomi memiliki cara dan jalan yang berbeda dalam menyelsaikan permasalahan tersebut. Dari hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan utama mengapa harus sistem Ekonomi Islam adalah ekonomi

³⁰ "Kisah BNI Menapaki Badai Krisis 1997-2020," accessed March 4, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210303145203-17-227568/kisah-bni-menapaki-badai-krisis-1997-2020>.

³¹ "Surah Al-Qaṣaṣ - سُورَةُ الْقَصْصِ - Qur'an Kemenag," 77, accessed March 4, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/28/77>.

Islam terbukti dari berbagai catatan sejarah mulai dari awal Rasulullah SAW. hingga kini, sistem ekonomi Islam nyata berbeda dalam menjawab permasalahan ekonomi *what, how, dan for whom*. Sistem ekonomi Islam bertumpu pada prinsip nilai yang memungkinkan *moral hazard* manusia diminimalisasi dengan tegaknya nilai Tauhid, keadilan dan keseimbangan. Sementara sistem ekonomi konvensional, kapitalisme dan sosialisme dengan filosofi keebasan individu dan diktatorian negara mencatat berbagai cacatan negatif mulai dari krisis 1929, krisis Subprime Mortgage, bubarannya NEP Soviet. Hasil penelitian ini berimplikasi pada penguatan pentingnya melakukan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada keadilan dan adanya keseimbangan dalam hidup yang tidak hanya berfokus pada materiil semata.

F. Daftar Pustaka

- Arrosyid, Afif. "Islam Dan Moral Ekonomi Dalam Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara." *MASYRIF: JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN* 2, no. 1 (June 15, 2021). <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.495>.
- Bakar, Abu. "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (September 26, 2020): 233–49. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>.
- Chapra, M. Umer. *Negara Sejahtera Islam Dan Perannya Di Bidang Ekonomi, Dalam Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Gampito, Gampito. "Menggapai Ekonomi Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 11, no. 2 (August 21, 2018). <https://doi.org/10.31958/juris.v11i2.1121>.
- Hardiati, Neni, Chaerul Shaleh, and Fauzan Ali Rasyid. "Epistemologi Politik Ekonomi Islam: Kajian Dalam Perekonomian Negara." *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 6, no. 1 (February 1, 2022): 380–87. <https://doi.org/10.29040/jie.v6i1.4478>.
- Kamal, Mustahafa. *Wawasan Islam Dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: UI-Press, 1997.
- Khatib, Suansar. "Distribusi Menurut Ekonomi Islam." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 3, no. 2 (December 29, 2019): 250–70. <https://doi.org/10.29300/mzn.v3i2.1036>.
- "Kisah BNI Menapaki Badai Krisis 1997-2020." Accessed March 4, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210303145203-17-227568/kisah-bni-menapaki-badai-krisis-1997-2020>.
- Lubis, Ibrohim. *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia, 1994.

- Maharani, Dewi, and Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 2 (November 10, 2020): 131–44. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.
- Mahmudah, Husnatul. "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Mea (Masyarakat Ekonomi Asean)." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1, no. 1 (May 26, 2018): 43–54.
- Media, Kompas Cyber. "Dampak The Great Depression terhadap Hindia Belanda Halaman all." KOMPAS.com, November 8, 2022. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/11/08/190000779/dampak-the-great-depression-terhadap-hindia-belanda>.
- "Mengenal the Great Depression: Krisis Ekonomi Paling Buruk." Accessed March 4, 2023. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/01/02/the-great-depression-adalah>.
- Muhtadi, Ridan, and Safarinda Imani. "Al-Magrizi Inflation Theory Of Islamic Monetary Policy Implementation In Indonesia." *International Journal of Islamic Economics* 2, no. 02 (January 19, 2021): 150–60. <https://doi.org/10.32332/ijie.v2i2.2097>.
- Nabhani, Taqiyuddin an-, suki SALEH, AMALIA A'la, and Abd Daenuri. *Al-Nidzami al-Iqtishadi Fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 1990.
- "New Economic Policy." In *Wikipedia*, February 17, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Economic_Policy&oldid=1139949830.
- Redaksi, Tim. "Badai Besar di Depan Mata! Lebih Ngeri Dari 1998 Atau 2008?" CNBC Indonesia. Accessed March 4, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221007091050-4-377928/badai-besar-di-depan-mata-lebih-ngeri-dari-1998-atau-2008>.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sukamto. "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Mainstream Dalam Mendorong Geliat Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang Studi Di Indonesia." *Jurnal Mu'allim* 1, no. 2 (September 5, 2019): 199–216. <https://doi.org/10.35891/muallim.v1i2.1624>.
- "Surah Al-Qamar - | Qur'an Kemenag." Accessed March 4, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/54/49>.
- "Surah Al-Qaṣāṣ - | Qur'an Kemenag." Accessed March 4, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/28/77>.
- Tarmizi, Tarmizi. "Comparison Of Islamic Economy And Conventional Economy To People's Income Growth In Reducing Poverty And Unemployment." *Jurnal Ilmiah Teunuleh* 1, no. 2 (December 28, 2020): 259–74. <https://doi.org/10.51612/teunuleh.v1i2.42>.